



PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama : Achmad Ardiansyah, S.TP., M.A.P
Jabatan : Sekretaris Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Provinsi Kepulauan Riau

selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : Misni, S.K.M., M.Si.
Jabatan : Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Provinsi Kepulauan Riau

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpinang, 6 Januari 2025

Pihak Kedua,

**Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan
Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau**

Misni, S.K.M., M.Si.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 197305161999032007

Pihak Pertama,

**Sekretaris Badan Perencanaan, Penelitian dan
Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau**

Achmad Ardiansyah, S.TP., M.A.P
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 197010122000031004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIS BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Nilai SAKIP Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	100 %
		1. Persentase Pemenuhan Penyusunan Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja PD	100 %
		a. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	2. Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %
		a. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	90 Orang/ Bulan
		b. Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen
		3. Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %
		a. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang
		4. Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %
		a. Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket
		b. Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket
		c. Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		d. Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket
		e. Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen
		f. Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan
		g. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan
		5. Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %
		a. Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit
		6. Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %
		a. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan
		b. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan
		c. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Laporan
		a. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan
		7. Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %
		a. Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		b. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit
		c. Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit
		d. Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 25,458,624,694,00	APBD
a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah • Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah • Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN • Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah • Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah • Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor • Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga • Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor • Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan • Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan • Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	- Rp. 195.964.271,00 - Rp. 19.973.860.738,00 - Rp. 613.320.000,00 - Rp. 15.000.000,00 - Rp. 15.000.762,00 - Rp. 50.000.061,00 - Rp. 100.019.769,00 - Rp. 102.823.851,00 - Rp. 50.000.000,00 - Rp. 125.003.550,00	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
• Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 603.975.539,00	
e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
• Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 51.315.200,00	
f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
• Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 10.000.000,00	
• Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 60.000.000,00	
• Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 194.000.000,00	
• Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 2.620.648.053,00	
g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
• Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. 78.757.900,00	
• Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 369.455.000,00	
• Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 39.480.000,00	
• Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. 190.000.000,00	

Tanjungpinang, 6 Januari 2025

Pihak Kedua,

Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau

Misni, S.K.M., M.Si.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 197305161999032007

Pihak Pertama,

Sekretaris Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau

Achmad Ardiansyah, S.TP., M.A.P
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 197010122000031004



PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama : **Nur Aisyah Fatmasari, S.E., M.M.**
Jabatan : **Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau**

selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **Misni, S.K.M., M.Si.**
Jabatan : **Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpinang, 6 Januari 2025

Pihak Kedua,

**Kepala Badan Perencanaan, Penelitian
dan Pengembangan
Provinsi Kepulauan Riau**

Misni, S.K.M., M.Si.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 197305161999032007

Pihak Pertama,

**Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan
Pembangunan Manusia
Badan Perencanaan, Penelitian dan
Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau**



Nur Aisyah Fatmasari, S.E., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198004122010012015

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BIDANG PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN
MANUSIA, BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Indeks Perencanaan Pembangunan	Persentase konsistensi Program dan Kegiatan RKPD dengan APBD	93%
		Persentase capaian hasil Evaluasi RKPD	90%
		1. Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pendanaan Yang Disusun	1 Dokumen
		a. Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara
		Persentase konsistensi Program/Kegiatan Renja Perangkat Daerah dengan DPA Perangkat Daerah Mitra Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia	93%
		1. Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	2 Dokumen
		2. Jumlah Laporan Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	6 Laporan
		a. Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen
		b. Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	2 Laporan
		c. Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	4 Laporan

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp. 254.999.600,00	APBD
Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		
Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Rp. 129.999.600,00	
Pelaksanaan Konsultasi Publik	Rp. 125.000.000,00	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 471,772,990,00	APBD
a. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		
• Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rp. 94.408.360,00	
• Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Rp. 90.318.360,00	
• Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Rp. 287.046.270,00	

Tanjungpinang, 6 Januari 2025

Pihak Kedua,

Kepala Badan Perencanaan, Penelitian
dan Pengembangan
Provinsi Kepulauan Riau

Pihak Pertama,

Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan
Pembangunan Manusia
Badan Perencanaan, Penelitian dan
Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau

Misni, S.K.M., M.Si.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 197305161999032007



Nur Aisyah Fatmasari, S.E., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198004122010012015



PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama : **Zulkarnaen Adijaya, S.T., M.M.**
Jabatan : **Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau**

selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **Misni, S.K.M., M.Si.**
Jabatan : **Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpinang, 6 Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Provinsi Kepulauan Riau

Pihak Pertama,
Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau


Misni, S.K.M., M.Si.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 197305161999032007




Zulkarnaen Adijaya, S.T., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198210142008031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BIDANG PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA
ALAM BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Indeks Perencanaan Pembangunan	Persentase konsistensi Program dan Kegiatan RKPD dengan APBD	93%
		Persentase capaian hasil Evaluasi RKPD	90%
		1. Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pendanaan Yang Disusun	2 Dokumen
		a. Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi	2 Berita Acara
		Persentase konsistensi Program/Kegiatan Renja Perangkat Daerah dengan DPA Perangkat Daerah Mitra Bidang Perencanaan Ekonomi dan Sumber Daya Alam	93%
		1. Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	1 Dokumen
		2. Jumlah Laporan Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	3 Laporan
		a. Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen
		b. Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan
		c. Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan
		d. Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1 Laporan

	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp. 468.947.295,00	APBD
	a. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		
	• Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Rp. 468.947.295,00	
2.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 450.000.000,00	APBD
	a. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		
	• Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rp. 150.000.000,00	
	• Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Rp. 100.000.000,00	
	• Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Rp. 100.000.000,00	
	• Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Rp. 100.000.000,00	

Tanjungpinang, 6 Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Provinsi Kepulauan Riau

Pihak Pertama,
Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau


Misni, S.K.M., M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 197305161999032007




Zulkarnaen Adijaya, S.T., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198210142008031001



PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama : Arman, S.T.

Jabatan : Kepala Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
Pembangunan Daerah, Badan Perencanaan, Penelitian dan
Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau

selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : Misni, S.K.M., M.Si.

Jabatan : Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Provinsi Kepulauan Riau

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpinang, 6 Januari 2025

Pihak Kedua,

**Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan
Pengembangan
Provinsi Kepulauan Riau**

Misni, S.K.M., M.Si.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 197305161999032007

Pihak Pertama,

**Kepala Bidang Perencanaan, Evaluasi dan
Pelaporan Pembangunan Daerah
Badan Perencanaan, Penelitian dan
Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau**

Arman, S.T.
Pembina (IV/a)
NIP 197908122007011009



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BIDANG PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PEMBANGUNAN
DAERAH, BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Indeks Perencanaan Pembangunan	Persentase konsistensi Program dan Kegiatan RKPD dengan APBD	93%
		Persentase capaian hasil Evaluasi RKPD	90%
		1. Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pendanaan Yang Disusun	19 Dokumen
		a. Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	15 Dokumen
		b. Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	4 Dokumen
		2. Jumlah Dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	26 Dokumen
		a. Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	5 Laporan
		b. Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi	21 Dokumen

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp. 1.976.777.457,00	APBD
a. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		
• Sub Kegiatan Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Rp. 120.000.000,00	
• Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Rp. 1.506.513.570,00	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
b. Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		
• Sub Kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Rp. 153.524.387,00	
• Sub Kegiatan Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 196.739.500,00	

Tanjungpinang, 6 Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Provinsi Kepulauan Riau

Pihak Pertama,
Kepala Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau


Misni, S.K.M., M.Si.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 197305161999032007




Arman, S.T.
Pembina (IV/a)
NIP 197908122007011009



PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama : Nanny Nurviani, S.Sos
Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi
Kepulauan Riau

selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : Misni, S.K.M., M.Si.
Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
Provinsi Kepulauan Riau

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpinang, 6 Januari 2025

Pihak Kedua,
**Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan
Pengembangan
Provinsi Kepulauan Riau**

Pihak Pertama,
**Kasubbag Umum dan Kepegawaian
Badan Perencanaan Penelitian dan
Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau**


Misni, S.K.M., M.Si.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 197305161999032007



Nanny Nurviani, S.Sos
Penata (III/c)
NIP 198807042015032003

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	100 %
		1. Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %
		a. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang
		2. Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %
		a. Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket
		b. Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket
		c. Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket
		d. Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket
		e. Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen
		f. Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan
		g. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan
		3. Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %
		a. Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit
		4. Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %
		a. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan
		b. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan	1 Laporan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		Listrik yang Disediakan	
		c. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Laporan
		d. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan
		5. Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %
		a. Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit
		b. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit
		c. Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit
		d. Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit

Kegiatan/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 4,675,479,685,00	APBD
a. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
• Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp. 15.000.000,00	
b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		
• Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 15.000.762,00	
• Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp. 50.000.061,00	
• Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 100.019.769,00	
• Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 102.823.851,00	
• Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp. 50.000.000,00	

Kegiatan/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
• Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Rp. 125.003.550,00	
• Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 603.975.539,00	
c. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
• Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 51.315.200,00	
d. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
• Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 10.000.000,00	
• Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 60.000.000,00	
• Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 194.000.000,00	
• Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 2.620.648.053,00	
e. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
• Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. 78.757.900,00	
• Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 369.455.000,00	
• Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 39.480.000,00	
• Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. 190.000.000,00	

Tanjungpinang, 6 Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
Provinsi Kepulauan Riau

Pihak Pertama,
Kasubbag Umum dan Kepegawaian
Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau


Misni, S.K.M., M.Si.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 197305161999032007




Nanny Nurviani, S.Sos
Penata (III/c)
NIP 198807042015032003



PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama : Misni, S.K.M., M.Si.
Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
Provinsi Kepulauan Riau

selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : H. Ansar Ahmad, S.E., M.M.
Jabatan : Gubernur Kepulauan Riau

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpinang, 6 Januari 2025

Pihak Kedua,
Gubernur Kepulauan Riau

H. Ansar Ahmad, S.E., M.M.

Pihak Pertama,
Kepala Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan
Provinsi Kepulauan Riau



Misni, S.K.M., M.Si.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 197305161999032007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

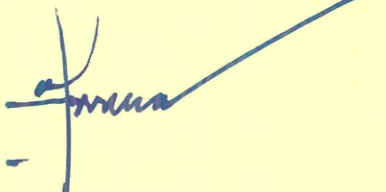
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas	Indeks Perencanaan Pembangunan	Baik
2.	Terwujudnya Rumusan Kebijakan Pembangunan dari Hasil Riset dan Inovasi Daerah	Persentase Hasil Riset yang direkomendasikan	100 %
		Indeks Inovasi Daerah	Inovatif
3.	Meningkatnya Kualitas dan Efektivitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	BB
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	91

Program		Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 25.458.624.694,-	APBD
2.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp. 2.725.724.352,-	APBD
3.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 1.412.680.590,-	APBD
4.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp. 407.722.000,-	APBD

Tanjungpinang, 6 Januari 2025

Pihak Kedua,
Gubernur Kepulauan Riau

Pihak Pertama,
Kepala Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan
Provinsi Kepulauan Riau


H. Ansar Ahmad, S.E., M.M.


Misni, S.K.M., M.Si.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 197305161999032007



PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama : **Raymond Rayendra Elven, S.Si., M.S.E., MA**
Jabatan : **Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah**
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi
Kepulauan Riau

selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **Misni, S.K.M., M.Si.**
Jabatan : **Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan**
Provinsi Kepulauan Riau

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpinang, 6 Januari 2025

Pihak Kedua,

**Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan
Pengembangan
Provinsi Kepulauan Riau**

Misni, S.K.M., M.Si.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 197305161999032007

Pihak Pertama,

Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Provinsi Kepulauan Riau

Raymond Rayendra Elven, S.Si., M.S.E., MA
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 198112112006041008

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BIDANG RISET DAN INOVASI DAERAH
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	1. Persentase Hasil Riset yang direkomendasikan 2. Indeks Inovasi Daerah	Persentase Hasil Riset yang direkomendasikan	100%
		1. Jumlah Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	2 Dokumen
		a. Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	1 Laporan
		b. Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	1 Laporan
		2. Jumlah Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	1 Dokumen
		a. Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	1 Dokumen
		3. Jumlah Pengembangan Inovasi dan Teknologi	1 Laporan
		a. Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1 Laporan
3.	Indeks Perencanaan Pembangunan	Persentase konsistensi Program dan Kegiatan RKPD dengan APBD	93%
		Persentase capaian hasil Evaluasi RKPD	90%
		1. Jumlah Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Dokumen
		a. Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dokumen

	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp. 407.722.000,00	APBD
	a. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		
	• Sub Kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Rp. 67.018.660,00	
	• Sub Kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Rp. 227.661.690,00	
	b. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan		
	• Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Rp. 45.392.960,00	
	c. Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi		
	• Sub Kegiatan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Rp. 67.648.690,00	
2.	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp. 25.000.000,00	APBD
	a. Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		
	• Sub Kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 25.000.000,00	

Tanjungpinang, 6 Januari 2025

Pihak Kedua,

**Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Provinsi Kepulauan Riau**

Misni, S.K.M., M.Si.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 197305161999032007

Pihak Pertama,

**Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Provinsi Kepulauan Riau**

Raymond Rayendra Elven, S.Si., M.S.E., MA
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 198112112006041008



PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama : **Udi Harbian, S.T., M.M.**
Jabatan : **Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan,
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi
Kepulauan Riau**

selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **Misni, S.K.M., M.Si.**
Jabatan : **Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Provinsi Kepulauan Riau**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpinang, 6 Januari 2025

Pihak Kedua,

**Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan
Pengembangan
Provinsi Kepulauan Riau**

Misni, S.K.M., M.Si.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 197305161999032007

Pihak Pertama,

**Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur
dan Kewilayahan
Badan Perencanaan, Penelitian dan
Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau**



Udi Harbian, S.T., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198405202008031003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BIDANG PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN,
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Indeks Perencanaan Pembangunan	Persentase konsistensi Program/Kegiatan Renja Perangkat Daerah dengan DPA Perangkat Daerah Mitra Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	93%
		1. Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	1 Dokumen
		2. Jumlah Laporan Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	3 Laporan
		a. Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen
		b. Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan
		c. Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan
		d. Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 490.907.600,00	APBD
a. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		
• Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rp. 99.982.600,00	
• Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Rp. 79.992.200,00	
• Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Rp. 140.933.600,00	
• Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Rp. 169.999.200,00	

Tanjungpinang, 6 Januari 2025

Pihak Kedua,
**Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan
Pengembangan**
Provinsi Kepulauan Riau

Misni, S.K.M., M.Si.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 197305161999032007

Pihak Pertama,
**Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur
dan Kewilayahan**
**Badan Perencanaan, Penelitian dan
Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau**

Udi Harbian, S.T., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198405202008031003